TEORI PLURALISME

NAMA : IRSYADHUL FIKRI ARISNA

EMAIL : irsyadhulfikri@gmail.com

NO BP : 2010003600080

UNIVERSITAS EKASAKTI

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengertian semacam ini ada sesuatu yang mendasar dari pluralism, yaitu “ketulusan hati” pada diri setiap manusia untuk menerima keanekaragaman yang ada. “Ketulusan” bukanlah hal yang mudah untuk ditumbuhkan dalam diri seseorang, atau dalam komunitas secara luas, sebab “ketulusan hati” ini berkaitan dengan kesadaran, latihan, kebesaran jiwa, dan kematangan diri.

Pluralisme adalah upaya membangun tidak saja kesadaran bersifat teologis tetapi juga kesadaran social. Hal itu berimpiklasikan pada kesadaran bahwa manusia hidup di tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman social lainnya. Karena dalam pluralis mengandung konsep teologis dan konsep sosiologis.

Pluralisme merupakan pengakuan atas perbedaan, dan perbedaan itu sesungguhnya sunnatullah dan merupakan sesuatu yang nyata serta tidak di pungkiri. Penolakan terhadap pluralism yang sunnatullah itu menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik, karena meniadakan sesuatu yang nyata merupakan pengingkaran terhadap kehendak Allah.

Pluralisme pada tujuannya tidak sebatas menghendaki pengakuan atas perbedaan itu, melainkan juga penghormatan atas kenyataan perbedaan. Untuk itu, sudah seharusnya diakui dengan jujur bahwa masyarakat Indonesia memang berbeda – beda dan karenanya segala perbedaan itu untuk dihormati. Kalau sikap seperti ini bisa dilakukan maka tidak mungkin ada ketegangan yang berujung pada konflik.

Konflik menurut Syafa’atun Elmirzanah, terjadi karena terdapat ketegangan yang mungkin disebabkan karena pengalaman – pengalaman diskriminasi, ketidakadilan atau kesalah pahaman yang berkaitan dengan status yang tidak sah dalam masyarakat, sehingga terjadi pemaksaan keinginan antara satu bagian dengan bagian lainnya, dan masing – masing ingin mendapatkan lebih dari yang seharusnya didapatkan.

Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi bukan pluralisme. Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan – ikatan keadaban. Pluralisme adalah keberadaan atau teloransi keragaman etnik atau kelompok – kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau Negara, serta keragaman.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan pluralisme dan pluraritas?
2. Bagaimana konsep pluralism?
3. Bagaimana Pluralisme dalam kehidupan sehari – hari ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa itu Pluralisme.
2. Untuk mengetahui konsep pluralisme.
3. Untuk mengetahui pluralism dalam kehidupan sehari – hari.

B. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pluralisme

Pluralisme berasal dari kata plural dan isme, plural yang berarti banyak (jamak), sedangkan isme berarti paham. Jadi, pluralism adalah suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi!

Secara umum pluralisme dapat diartikan adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya “Kemajemukan” atau “Keanekaragaman” dalam suatu kelompok masyarakat. Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer, pluralisme berarti: “teori yang mengatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi”. Pluralisme yang berarti jamak atau lebih dari satu, dalam kamus bahasa Inggris mempunyai tiga pengertian.

Pertama, pengertian kegerejaan: (i) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, (ii) memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat/kegerejaan maupun non kegerejaan.

Kedua, pengertian filosofis; berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasarkan lebih dari satu. Sedangkan ketiga, pengertian sosio-politis: adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut.

Ketiga, pengertian tersebut sebenarnya bisa disederhanakan dalam satu makna, yaitu koeksistensinya berbagai kelompok atau keyakinan di satu waktu dengan tetap terpeliharanya perbedaan-perbedaan karakteristik masing-masing. Dalam perspektif ilmu sosial, pluralisme yang meniscayakan adanya diversitas dalam masyarakat memiliki dua “wajah”, konsensus dan konflik. Konsensus mengandaikan bahwa masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda itu akan survive (bertahan hidup) karena para anggotanya menyepakati hal-hal tertentu sebagai aturan bersama yang lain harus ditaati, sedangkan teori konflik justru memandang sebaliknya bahwa masyarakat yang berbeda-beda itu akan bertahan hidup karena adanya konflik. Teori ini tidak menafikkan adanya keharmonisan dalam masyarakat. Keharmonisan terjadi bukan karena adanya kesepakatan bersama, tetapi karena adanya pemaksaan kelompok kuat terhadap yang lemah.

Kemajemukan dimaksud misalnya dilihat dari segi agama, suku, ras, adat-istiadat, dll. Segi-segi inilah yang biasanya menjadi dasar pembentukan aneka macam kelompok lebih kecil, terbatas dan khas, serta yang mencirikhaskan dan membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dalam suatu kelompok masyarakat yang majemuk dan yang lebih besar atau lebih luas. Misalnya masyarakat Indonesia yang majemuk, yang terdiri dari pelbagai kelompok umat beragama, suku, dan ras, yang memiliki aneka macam budaya atau adat-istiadat. Begitu pula masyarakat Maluku yang majemuk, ataupun masyarakat Aru yang majemuk. Menerima kemajemukan berarti menerima adanya

perbedaan. Menerima perbedaan bukan berarti menyamaratakan, tetapi justru mengakui bahwa ada hal atau ada hal-hal yang tidak sama. Menerima kemajemukan (misalnya dalam bidang agama) bukanlah berarti bahwa membuat “penggabungan gado-gado”, dimana kekhasan masing-masing terlebur atau hilang. Kemajemukan juga bukan berarti “tercampur baur” dalam satu “frame” atau “adonan”. Justru di dalam pluralisme atau kemajemukan, kekhasan yang membedakan hal (agama) yang satu dengan yang lain tetap ada dan tetap dipertahankan. Jadi pluralisme berbeda dengan sinkritisme (penggabungan) dan asimilasi atau akulturasi (penyingkiran). Juga pluralisme tidak persis sama dengan inkulturasi, kendati di dalam pluralisme atau kemajemukan bisa terjadi inkulturasi dimana keaslian tetap dipertahankan.

Definisi Pluralisme menurut para ahli :

1) Menurut Nurcholis Madjid pluralisme tidak dapat di pahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita mejemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh sekedar kebaikan negative, hanya di tilik dari kegunaanya untuk menyingkirkan fanatisme. Pluralisme harus di pahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Maka pluralisme menurut Nurcholis Madjid adalah sebuah aturan Tuhan (Sunnat Allah “Sunnatullah”) yang tidak akan berubah, sehingga juga tidak mungkin dilawan atau di ingkari.

2) Menurut Alwi Shihab tentang pluralisme yaitu Pertama, pluralisme tidaklah semata-mata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun keterlibatan secara aktif terhadap realitas majemuk tersebut. Hal ini akan melahirkan interaksi positif. Kedua, pluralisme bukan kosmopolitanisme Karena kosmopolitanisme menunjuk pada suatu realitas dimana keanekaragaman agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi, namun interaksi positif yang berkembang sangat minim dan malah tidak ada sama sekali. Ketiga, pluralisme tidak sama dengan relativisme karena konsekuensi dari relativisme agama adalah munculnya doktrin bahwa semua agama adalah sama, hanya didasari pada kebenaran agama walaupun berbeda-beda satu sama lain tetapi harus diterima. Seorang relativisme tidak mengenal adanya kebenaran individual adanya kebenaran universal yang ada pada agama. Keempat, pluralisme agama bukan sinkritisme yakni menciptakan agama baru dengan menggabungkan unsur-unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama menjadi satu integral dalam agama tersebut.

3) Menurut Masykuri Abdillah dengan mengutip The Oxford English Dictionary, mengelaborasi paham pluralisme sebagai berikut: (i) suatu teori yang menentang Negara monolitik; dan sebaliknya, mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat. Selain itu, suatu keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi bersama-sama di antara sejumlah partai politik. (ii) keberadaan toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau Negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan, dan sebagainya. Definisi yang pertama mengandung definisi politik, sedangkan definisi kedua mengandung pengertian pluralisme sosial atau primordial

2.2 Konsep Pluralisme

Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Selain itu, dalam konsep pluralisme, kelompok-kelompok yang berbeda memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada yang mendominasi maupun menguasai antar kelompok.

Konsep pluralisme salah satunya diterapkan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai etnis dan ras. Oleh sebab itu, pluralisme diterapkan agar masyarakat saling menghargai satu sama lain dan untuk meminimalisir terjadinya konflik di dalam masyarakat. Etnis, suku, dan ras yang ada di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang sama dan tidak ada pembedaan. Contohnya masyarakat Jawa menganut sistem patrilineal dan masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Tidak ada pembedaan dari kedua sistem tersebut, masing-masing masyarakat saling menghargai kedua sistem tersebut. Maka inti dan dasar pluralisme adalah kesediaan rakyat Indonesia untuk hidup bersama.

Empat Konsep Pluralisme Dalam Pancasila Konsep pluralisme sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia dan sudah diketahui keberadaannya jauh sebelum negara Indonesia ini didirikan. Kita sudah mengenal semboyan "Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua" (beragam dalam kesatuan, tidak ada "dharma" yang kedua), yang merupakan simbol pluralisme Hindu-Budha yang telah dibangun bangsa ini. Jalan yang ditempuh bisa berbeda tetapi sesungguhnya ditujukan untuk Tuhan yang sama. Konsep pluralisme ini kemudian diperluas tidak hanya dalam konteks agama tetapi menjadi bingkai persatuan Indonesia yang memiliki kemajemukan budaya, adat, bahasa, dan kemudian terkristal dalam satu konsensus politik yang bernama Pancasila.

Kesepakatan diterimanya dasar negara sekaligus cita-cita negara ini, sesungguhnya menunjukkan bahwa bangsa ini telah memiliki kedewasaan dalam memahami keanekaragaman. Alwi Shihab(1998: 335-336) mencatat beberapa komentar positif tentang Indonesia, tentunya sebelum Indonesia mengalami berbagai krisis seperti saat ini. Fazlur Rahman pernah meramalkan bahwa Islam yang sejuk dan menarik dan yang menghidupkan kembali nilai luhur toleransi dan moderasi Nabi Muhammad menyingsing dari Bumi Indonesia. Demikian pula Lawrence Sullivan, kepada pusat pengkajian agama dunia pada Universitas Harvard Amerika, secara terbuka mengatakan, bahwa Indonesia secara kreatif telah mewujudkan pendekatan baru dalam menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis, yang tidak dijumpai di banyak negara Eropa dan Amerika. Sullivan menandakan bahwa "Indonesia is a model religious tolerance that other countries could do well to emulate" (Indonesia merupakan model toleransi keagamaan yang patut ditiru oleh negara lain). Konsep pluralisme lahir dari latar belakang pemikiran dan kondisi sosial, politik, budaya tertentu. Artinya bahwa pluralisme itu merupakan sebuah konstruksi sosial. Pluralisme dalam konsep dan aplikasinya barangkali tepat diterapkan di satu wilayah tertentu namun tidak tepat dan bahkan menghasilkan persoalan baru di tempat yang lain.

Humanisme sekuler, misalnya dapat diterima di Barat oleh karena paham eksistensialisme yang telah lama mengakar dan menempatkan manusia sebagai pusat eksistensi. Hal ini akan berbeda dengan masyarakat Timur yang memahami keunggulan eksistensi manusia justru ketika dirinya merasa bagian dari alam dan 'menyatu' dengan Tuhan. Demikian pula teologi globalnya John Hick yang diilhami oleh perkembangan globalisasi, akan ditolak oleh masyarakat yang masih memegang erat tradisi dan kaidah literal agama. Berbagai karakter pluralisme tersebut dapat pula diposisikan sebagai satu bentuk pemikiran bukan ajaran agama yaitu, bagian dari pemikiran keagamaan, sehingga ketidaksetujuan terhadap pemikiran tersebut seharusnya ditanggapi pula dengan pemikiran dan tidak dengan fatwa. Kekhawatiran yang muncul ketika pendekatan fatwa digunakan untuk mengkaunter satu pemikiran, maka tragedi abad pertengahan, yaitu pemandulan rasio akan kembali terjadi. Kondisi demikian justru kontraproduktif dan lebih jauh dapat menghasilkan sikap resistensi terhadap agama (institusi agama).

Macam Pluralisme

Berikut ini merupakan jenis-jenis pluralisme yang ada di masyarakat secara umum, yaitu antara lain;

1. Pluralisme Agama

Keberagaman agama dalam masyarakat menjadikan hidup ini lebih berwarna. Keberagaman tersebut dapat diimbangi dengan sikap toleransi. Sebab, bila keberagaman agama tidak disertai dengan sikap toleransi akan mengakibatkan perpecahan maupun konflik dalam masyarakat.

2. Pluralisme Ilmu Pengetahuan

Pertumbuhan dalam ilmu pengetahuan dapat menunjukkan hak-hak individu dalam memutuskan kebenaran yang sifatnya universal bagi masing-masing individu.

3. Pluralisme Sosial

Dalam lingkungan sosial, interaksi dalam masyarakat dapat ditunjukkan dengan rasa saling menghormati satu dengan yang lain. Hidup berdampingan tanpa adanya konflik merupakan sebuah cita-cita yang hendak tercapai dalam pluralisme.

4. Pluralisme Media

Media merupakan salah satu aspek terpenting sebagai alat dalam menyiarkan informasi dan memiliki wewenang secara bebas serta keberadaannya telah diakui oleh negara. Dalam pengamalannya untuk penyampaian pendapat ini beragam adanya, misalnya saat adanya Pilihan Presiden di Indonesia. Dalam berbagai contoh sosial media ada yang mendukung salah satu calon dan yang satunya mendukung calon yang berbeda.

5. Pluralisme Budaya

Keberagaman unsur budaya seringkali menjadi penyebab utama terjadinya konflik di berbagai negara. Pemicu dari adanya konflik budaya dalam masyarakat adalah timbulnya persaingan serta adanya sikap primordialisme dan egosentrisme, dimana masyarakat menganggap bahwa entitas yang mereka miliki adalah etnik yang paling baik.

2.3 Contoh Pluralisme dalam Kehidupan Sehari-hari

Contoh pluralisme yang biasa kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari antara lain sebagai berikut :

- Harmoni kebersamaan dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal.
- Tidak ada paksaan terhadap kehendak orang lain untuk memeluk agama yang kita anut.
- Tidak memaksakan kepada orang lain tentang keyakinan yang kita miliki.
- Bekerja sama dalam pembangunan fasilitas umum.
- Membantu orang lain saat mengalami musibah kecelakaan atau bencana alam tanpa melihat suku, budaya, dan agamanya.
- Saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban dari masing-masing agama.
- Menghormati serta menjunjung tinggi adat istiadat yang ada dalam masyarakat.
- Bersikap terbuka dalam menerima perbedaan pandangan dan pendapat.
- hidup berdampingan antar umat beragama, seperti yang ada di Bali dimana masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu dapat hidup berdampingan dengan masyarakat pendatang dengan kepercayaan yang berbeda dengan penduduk setempat (diluar agama hindu).
- Tidak melakukan tindakan onar dalam lingkungan masyarakat.
- Saling menghormati dalam menyikapi perbedaan perayaan dalam keyakinan.
- Ikut serta dalam membangun persatuan demi mencapai pembangunan negara.

Kesimpulan dan Saran :

a) Pluralisme adalah menerima kehadiran orang lain atas dasar konsep hidup berdampingan secara damai, tidak saling mengganggu, dan mengembangkan kerjasama sosial-keagamaan melalui berbagai kegiatan untuk mendorong proses pengembangan kehidupan beragama yang rukun. Di Indonesia nilai-nilai pluralisme sudah tercakup dalam isi Pancasila, dan dilindungi oleh undang-undang 1945 (UUD 45). b) pluralisme merupakan konsep yang mengatur bagaimana cara untuk bisa hidup rukun dan damai dalam kemajemukan masyarakat, baik dalam hal sosial, agama, adat istiadat dan budaya, dimana tujuannya adalah supaya mereka bisa saling bekerja sama dalam membangun sebuah negara atau kelompok masyarakat.

Saran Sebagai penutup,

a) Makalah ini hanya mencari secara sederhana mengenai pluralisme secara umum dan dilakukan penulis amatlah sederhana, sehingga masih membutuhkan koreksi tambahan untuk menambah wawasan penulis tentang pluralisme.

b) Dengan adanya makalah ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai pluralisme secara umum. Penulis juga berharap alangkah baiknya jika makalah yang sederhana dapat membantu teman-teman yang lain yang sedang menyusun makalah yang sama sehingga mendapatkan inspirasi.

Daftar Pustaka :

Gokma Toni Parlindungan S, Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Hakim Dalam Perkara Poligami Di Pengadilan Negeri Pasaman Sebagai Ceriminan Ius Constitutum, Volume 2, Nomor 1, 2020.

Gokma Toni Parlindungan S, Pengisian Jabatan Perangkat Nagari Pemekaran Di Pasaman Barat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Ensiklopedia Of Journal, Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019,

Harniwati, Peralihan Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Volume 1, Nomor 3, 2019.

Jasmir, Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Jumrawarsi Jumrawarsi, Neviyarni Suhaili, Peran Seorang Guru Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Kondusif, Ensiklopedia Education Review, Vol 2, No 3 (2020): Volume 2 No.3 Desember 2020

Mia Siratni, Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Ensiklopedia Of Journal, Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019,

Remincel, Dimensi Hukum Pelanggaran Kecelakaan Lalu Dan Angkutan Jalan Lintas Di Indonesia, Ensiklopedia Social Review, Volume 1, Nomor 2, 2019.

R Amin, B Nurdin, Konflik Perwakafan Tanah Muhammadiyah di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Indonesia 2015-2019, Soumatera Law Review, Volume 3, Nomor 1, 2020.